

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI secara normatif telah memiliki dasar hukum yang sah, baik melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri keuangan, maupun surat keputusan Sekretariat Jenderal DPR RI. Proses kebijakan tersebut pada dasarnya dilakukan melalui pengusulan internal DPR atau Sekretariat Jenderal DPR, pembahasan bersama pemerintah dalam kerangka anggaran negara (APBN), serta penetapan melalui instrumen hukum yang berlaku. Dengan demikian, secara formal dan prosedural, kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI dapat dikatakan memenuhi aspek legalitas dan kepastian hukum.
2. Ditinjau dari perspektif keadilan, kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles, prinsip keadilan John Rawls, serta nilai keadilan menurut Gustav Radbruch, kenaikan tunjangan anggota DPR RI masih menimbulkan ketimpangan apabila dibandingkan dengan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia. Ketimpangan tersebut

semakin terasa ketika sebagian besar rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan kerja, dan tekanan ekonomi, sementara tunjangan pejabat negara justru mengalami peningkatan signifikan.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Disarankan agar mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan terbuka kepada publik. Penetapan tunjangan sebaiknya mempertimbangkan secara proporsional kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta dikaitkan dengan kinerja dan tanggung jawab anggota DPR RI, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial.

2. Kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan

Disarankan agar dalam menyetujui dan menetapkan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal dan keadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan kemampuan keuangan negara serta tidak menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat, sehingga pengelolaan anggaran negara dapat berjalan secara efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *DPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2017.
- . *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. “Pedoman Penulisan Skripsi: Legal Memorandum dan Studi Kasus.” Jakarta, 2022.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. 13 ed. Depok: Rajawali Pers (PT RajaGrafindo Persada), 2019.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Revisi. Yogyakarta: Paradigma, 2022.
- Mardiasmo. *Akuntabilitas Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group), 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2 ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Sudrajat, Joko. “Kedudukan Partai Politik Dalam Proses Pengajuan Usul Amandemen Ke-5 UUD Negara Republik Indonesia 1945.” Universitas Semarang, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. 2 ed. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2016.
- . *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diedit oleh Nunuk Nuswardani. 1 ed. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2017.
- Zainal, Elda Aldira Laniza. *Hukum Anggaran dan Keuangan Negara*. Diedit oleh Yuche Yahya Sukaca. Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020.

Jurnal

- Abadi, Slamet, Junaedi, dan Rasman Habeahan. "PPh PASAL 21 DAPAT DITANGGUNG ATAU DITUNJANG OLEH PENGUSAHA." *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 9 (2024): 865–72.
- Muchlisin, Muchlisin. "Kedudukan Serta Fungsi Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia." *Mimbar Yustitia* 3, no. 2 (2020): 124–30. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i2.2019>.
- Muhammad, Kurniawan. "Pengaruh Implementasi Sistem Remunerasi terhadap Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Mutu Pelayanan Publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Malang Raya." *Jurnal Administrasi Publik* 19, no. 8 (2025): 97–102.
- Munib, M Abdim, dan Alfiani Dewi Bulan Safitri. "Implikasi Penerapan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Terhadap Akuntabilitas Anggota Legislatif" 6, no. 1 (2025): 391–404.
- Perdana, Muhammad Ramdhani Putra. "Pengaruh Tunjangan Kinerja Dinamis dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 2 (2023): 55–66.
- Pratiwi, Alya Citra, Reva Alya Annisa, dan Ruminah Jubaidah Hasibuan. "Analisis Efektivitas Besarnya Tunjangan Kinerja Sebagai Insentif Finansial Dalam Mendorong Kinerja ASN di Kementerian Keuangan." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 1 (2025): 1–12.
- Setyorini, Eny, dan Wuku Astuti. "Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta." *EBBANK* 12, no. 1 (2022): 27–32.
- Triyudiana, Andra, dan Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 1–25.
- Widodo, Tondo, dan Ahmad Zaenuri. "Dampak Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan: Perspektif Teori dan Praktik." In *Bookchapter Manajemen SDM Jilid 1*, 667–95. Universitas Negeri Semarang, 2025. <https://doi.org/10.15294/msdm.v1i1.385>.

Web Page

- Asih, Restu Wahyuning. "Macam-macam Tunjangan yang Didapat Anggota DPR RI." *Bisnis.com*, 2025. <https://kabar24.bisnis.com/read/20250819/15/1903644/macam-macam-tunjangan-yang-didapat-anggota-dpr-ri>.
- Az-Zahra S, Balqish. "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024.

<https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>.

Azizah, Alvia Nur. "Apa Itu Hak Angket DPR? Ini Pengertian, Fungsi, Syarat dan Contohnya." *detikjateng*, 2024. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7211315/apa-itu-hak-angket-dpr-ini-pengertian-fungsi-syarat-dan-contohnya>.

CNN Indonesia. "Wakil Ketua DPR Akui Ada Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan." *CNN Indonesia*, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250820145835-92-1264466/wakil-ketua-dpr-akui-ada-kenaikan-tunjangan-anggota-dewan>.

Diahwahyuningtyas, Alicia, dan Ahmad Naufal Dzulfaroh. "Rincian Lengkap Gaji dan Tunjangan DPR RI, Capai Rp 104 Juta per Bulan." *Kompas.com*, 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/20/101500865/rincian-lengkap-gaji-dan-tunjangan-dpr-ri-capai-rp-104-juta-per-bulan>.

Gavrila, Angel. "Benarkah Gaji Anggota DPR RI Naik? Simak Take Home Pay Anggota DPR RI 2025 Berikut Ini," 2025. <https://goodstats.id/article/simak-take-home-pay-anggota-dpr-ri-2025-wsQZm>.

Grehenson, Gusti. "Penghasilan Anggota DPR Naik, Dosen UGM Tekankan Pentingnya Kepekaan Terhadap Kondisi Rakyat." *Universitas Gadjah Mada*, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/penghasilan-anggota-dpr-naik-dosen-ugm-tekankan-pentingnya-kepekaan-terhadap-kondisi-rakyat/>.

Hafiez, Fachri Audhia. "Tunjangan Legislator Naik, Pimpinan: Menkeu Mungkin Kasihan ke DPR." *METROTV*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/KYVC4BX8-tunjangan-legislator-naik-pimpinan-menkeu-mungkin-kasihan-ke-dpr>.

Handoyo. "Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Terbaru: Rumah Rp 50 Juta, Beras Rp 12 Juta per Bulan." *Kontan.co.id*, 2025. <https://nasional.kontan.co.id/news/rincian-gaji-dan-tunjangan-dpr-terbaru-rumah-rp-50-juta-beras-rp-12-juta-per-bulan>.

Idris, Muhammad. "Rincian Lengkap Gaji Anggota DPR RI dan Semua Tunjangan, Capai 3 Digit." *Kompas.com*, 2025. <https://money.kompas.com/read/2025/08/19/115446626/rincian-lengkap-gaji-anggota-dpr-ri-dan-semua-tunjangan-capai-3-digit>.

KantorKu HRIS. "13 Jenis Tunjangan Karyawan, Contoh serta Aturan Perhitungan sesuai UU." *Kantorku*, 2025. <https://kantorku.id/blog/jenis-tunjangan-karyawan/>.

———. "Pentingnya Tunjangan: Definisi, Manfaat, dan Bedanya dengan Gaji!" *Kantorku*, 2025. <https://kantorku.id/blog/tunjangan-adalah/>.

Khabibi, Nur. "DPR Akhirnya Pangkas Tunjangan Listrik, Telepon, hingga Transportasi Anggota Dewan." *SindoNews*, 2025. <https://nasional.sindonews.com/read/1616375/12/dpr-akhirnya-pangkas>.

tunjangan-listrik-telepon-hingga-transportasi-anggota-dewan-1757074170.

Khoirunnisaa, Jihaan. "Langkah DPR Hentikan Tunjangan & Pangkas Fasilitas Tuai Apresiasi." detikNews, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8099101/langkah-dpr-hentikan-tunjangan-pangkas-fasilitas-tuai-apresiasi>.

Kholisdinuka, Alfi. "Pimpinan DPR Luruskan Isu Kenaikan Gaji Anggota hingga Tunjangan Perumahan." detikNews, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8070653/pimpinan-dpr-luruskan-isu-kenaikan-gaji-anggota-hingga-tunjangan-perumahan>.

Kompasiana. "Tunjangan Rumah DPR RI Rp50 Juta : Kemewahan di Tengah Penderitaan Rakyat." Kompasiana, 2025. <https://www.kompasiana.com/otnielzebua8672/68afe8ef34777c078c02d272/tunjangan-rumah-dpr-ri-rp50-juta-kemewahan-di-tengah-penderitaan-rakyat>.

KPU Kabupaten Jayawijaya. "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch: Antara Hukum Positif dan Moralitas Kemanusiaan." KPU Kabupaten Jayawijaya, 2025. https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8542_teorikeadilanmenurutgustavradrbruchantarahukumpositifdanmoralitaskemanusiaan.

Kriswaningsih, Tri Angga. "DPR Hentikan Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Anggotanya per 31 Agustus 2025." Kompas.tv, 2025. <https://www.kompas.tv/nasional/615865/dpr-hentikan-pemberian-tunjangan-perumahan-bagi-anggotanya-per-31-agustus-2025>.

M, Siti. "Lembaga Legislatif: Fungsi dan Pasalnya." Gramedia Blog, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/lembaga-legislatif-fungsi-dan-pasalnya/>.

Mahendra, Yusril Ihza. "Intip Gaji DPR dan DPRD serta Dasar Hukumnya." JDIH Sukoharjo, 2025. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/intip-gaji-dpr-dan-dprd-serta-dasar-hukumnya>.

Mannan, Achmad Ghiffary. "Begini Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR." Tempo, 2025. <https://www.tempo.co/politik/begini-rincian-gaji-dan-tunjangan-anggota-dpr-2060395>.

Maulid, Reyvan. "Berapa Besar Tunjangan Komunikasi Anggota DPR? Ini Rinciannya!" IDN TIMES, 2025. <https://www.idntimes.com/tech/trend/berapa-besar-tunjangan-komunikasi-anggota-dpr-clc2-01-7cxy7-zbyxlr>.

Muliawati, Anggi. "Pimpinan DPR Tegaskan Gaji Anggota Dewan Tetap: Cuma Tunjangan yang Naik." detikNews, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8068780/pimpinan-dpr-tegaskan-gaji-anggota-dewan-tetap-cuma-tunjangan-yang-naik>?

News, Antara. "Fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia." Antara News, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4796133/fungsi-lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-di-indonesia>.

Nurhalija, Nadia. "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch." Portal Hukum, 2025. <https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch/>.

Pangastuti, Triyan. "DJP: Gaji Anggota DPR Tetap Kena Pajak." IDN TIMES, 2025. <https://www.idntimes.com/business/economy/djp-gaji-anggota-dpr-tetap-kena-pajak-00-gshdq-zmnsbk>.

Parlementaria. "Menjawab Tuntutan 17+8, DPR RI Hentikan Sejumlah Fasilitas Anggota dan Komitmen Transparansi." Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2025. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59034/t/Menjawab%2BTuntutan%2B17%2B8%2C%2BDPR%2BRI%2BHentikan%2BSejumlah%2BFasilitas%2BAnggota%2Bdan%2BKomitmen%2BTransparansi>.

———. "Sufmi Dasco: Pengajuan Hak Angket Perlu Melalui Mekanisme." Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/parlementaria>.

Putra, Dhika Dwi. "DPR Sepakati Enam Langkah Reformasi, Gaji dan Tunjangan Dipangkas." Berita Nasional Update.com, 2025. <https://beritanasionalupdate.com/news/details/398/dpr-sepakati-enam-langkah-reformasi,-gaji-dan-tunjangan-dipangkas>.

Putri, Vana Karunia Mulia, dan Serafica Gischa. "Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan Contohnya." Kompas.com, 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya>.

Rachman, Fadhly Fauzi. "Besaran Gaji-Tunjangan 580 Anggota DPR RI Periode 2024-2029." detikSumut, 2024. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7567635/besaran-gaji-tunjangan-580-anggota-dpr-ri-periode-2024-2029>.

Rahadian, Aristya. "Ini Daftar Rincian Lengkap Gaji & Tunjangan DPR." CNBC Indonesia, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250902112405-131-663537/ini-daftar-rincian-lengkap-gaji-tunjangan-dpr>.

Roofig, Muhammad. "Tugas dan Wewenang DPR RI Serta Hak-Haknya." Bisnis.com, 2025. https://kabar24.bisnis.com/read/20251021/15/1921843/tugas-dan-wewenang-dpr-ri-serta-hak-haknya#goog_rewarded.

Sutrisna, Tri, dan Nawir Arsyad Akbar. "8 Fraksi di DPR Sepakat Hapus Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta per Bulan." Kompas.com, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/04/15030641/8-fraksi-di-dpr-sepakat-hapus-tunjangan-perumahan-rp-50-juta-per-bulan>.

Sutrisna, Tria, dan Nawir Arsyad Akbar. "Anggota DPR Juga Dapat Tunjangan Beras, Rp 12 Juta per Bulan." Kompas.com, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/19/19220791/anggota-dpr-juga>.

dapat-tunjangan-beras-rp-12-juta-per-bulan.

Syarifudin, Taufiq. "DPR Umumkan Setop Tunjangan Rumah dan Moratorium Kunker Luar Negeri." detikNews, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8098086/dpr-umumkan-setop-tunjangan-rumah-dan-moratorium-kunker-luar-negeri>.

Tim Hukumonline. "Mengenal Hak dan Kewajiban Anggota DPR." Hukumonline.com, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kewajiban-DPR-lt68a840030c4cf/>.

———. "Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR." Hukumonline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/>.

Tim Penulis Kerjoo. "Tunjangan adalah: Jenis, Fungsi, dan Manfaat bagi Karyawan." Kerjoo, 2024. <https://kerjoo.com/blog/tunjangan-adalah-jenis-fungsi-dan-manfaat-bagi-karyawan/>.

Tolok, Aprianus Doni. "Lengkap! Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Sebelum dan Setelah Dipangkas." Bisnis.com, 2025. <https://www.bisnis.com/read/20250906/638/1908859/lengkap-gaji-dan-tunjangan-anggota-dpr-sebelum-dan-setelah-dipangkas>.

Universitas Widya Mataram. "Tunjangan Kinerja Karyawan." Universitas Widya Mataram, 2023. <https://new.widyamataram.ac.id/content/news/tunjangan-kinerja-karyawan>.

Utami, Silmi Nurul. "Perbedaan dari Hak Interpelasi dan Hak Angket." Kompas.com, 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/15/130837069/perbedaan-dari-hak-interpelasi-dan-hak-angket>.

Wikanto, Adi. "Tunjangan Bensin & Beras Naik, Cek Rincian Gaji & Tunjangan Anggota DPR 2025." Kontan.co.id, 2025. <https://nasional.kontan.co.id/news/tunjangan-bensin-beras-naik-cek-rincian-gaji-tunjangan-anggota-dpr-2025>.